

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENGELUARAN  
PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**HERNAWATI**

**105710203614**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENGELUARAN  
PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh  
HERNAWATI  
105710203614**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan Ku persembahkan karya ini untuk:

Kedua Orang tuaku yang kucintai Ayahanda "**Mursidin**" dan Ibunda "**Nurtang**", Saudaraku **Henra, Lisa, Alif** serta Suamiku **Ali Asgar** dan Anakku tercinta **Qoriah Maulidya** yang telah mencurahkan rasa kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materi, serta doa yang selalu mengiringi langkahku.

## MOTTO

"Selalu ada harapan dan jalan bagi mereka yang sering berdoa, berusaha dan memasrahkan diri kepada Allah SWT"



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan."

Nama Mahasiswa : Hernawati  
No. Stambuk/NIM : 105710203614  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 30 September 2019 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Dr. Andi Jam'an, SE., M. Si**  
NIDN:0902116603

Pembimbing II,

**Warda, SE., M. E**  
NIDN:0927039003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi EP,

**Hi. Naidah, SE., M. Si**  
NBM: 710 561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedungiqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Hernawati**, Nim: **105710203614**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0007/SK-Y/60201/091004/2019, Tanggal 1 Safar 1441 H / 30 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

1 Safar 1441 H

Makassar,

30 September 2019

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM.  
2. Dr. Muh Ikram Idrus, MS  
3. Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM  
4. Nasrullah, SE.,MM

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411) 866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hernawati

Stambuk : 105710203614

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto,  
Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone  
Provinsi Sulawesi Selatan."

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi EP

**Hj. Naidah, SE, M. Si**  
NBM: 710 561

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga., sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Mursidin** dan ibu **Nurtang** serta suamiku **Ali Asgar** dan Anakku tercinta **Qoriah Maulidya** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta **Henra, Lisa** dan **Alif** yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj. Naidah, SE, M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Asdar, SE., M.Si**, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak **Dr. Andi Jam'an, SE., M. Si.**, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
6. Ibu **Warda, SE., M. E.**, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 serta angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 30 September 2019

**Penulis**

## **ABSTRAK**

**Hernawati**, Tahun 2019 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Jam'an Pembimbing II Warda.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (2) Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (3) Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (4) Mengetahui faktor yang berpengaruh dominan terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan PAD

## **ABSTRACT**

**Hernawati**, 2019 *The Effect of Gross Regional Domestic Product, Government Expenditures, and Total Population on the Original Local Government Revenue of Bone Regency of South Sulawesi Province*, Thesis of Economic Development Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Advisor I Andi Jam'an Advisor II Warda.

*This study aims to: (1) Determine the effect of GRDP on Original Revenue in Bone Regency of South Sulawesi Province (2) Knowing the Effects of Government Expenditures on Original Revenue in Bone Regency of South Sulawesi Province (3) Determine the effect of population on Original Revenue in Bone of South Sulawesi Province ( 4) Knowing the factors that have dominant influence on Original Revenue in Bone Regency of South Sulawesi Province. The results showed that the simultaneous variables of GRDP, Government Expenditure and Population had a positive and significant effect on the Original Revenue of Bone Regency of South Sulawesi Province. Partially the GRDP positive effect is not significant on Regional Original Revenue while Government Expenditure and Population Number have positive and significant effect on Regional Original Revenue of Bone Regency of South Sulawesi Province.*

*Keywords: GRDP, government expenditure, population and Original Local Government Revenue*

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>SAMPUL</b> .....                     | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....              | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....        | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....        | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....         | <b>v</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....           | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                    | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....               | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....              | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....          | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                 | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 8          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....    | <b>9</b>   |
| A. TinjauanTeori .....                  | 9          |
| 1. Pendapatan Asli Daerah .....         | 9          |
| 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....  | 11         |
| 3. Produk Domestik Regional Bruto ..... | 16         |
| 4. Pengeluaran Pemerintah .....         | 18         |
| 5. Jumlah Penduduk .....                | 20         |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Hubungan Antar Variabel.....                              | 21        |
| 1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap PAD .... | 21        |
| 2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD .....        | 21        |
| 3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap PAD .....               | 22        |
| C. Tinjauan Empiris .....                                    | 23        |
| D. Kerangka Konsep .....                                     | 25        |
| E. Hipotesis .....   | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                        | <b>27</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                    | 27        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                         | 27        |
| C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....        | 28        |
| 1. Variabel Independen dan Dependen .....                    | 28        |
| 2. Definisi Operasional .....                                | 28        |
| D. Sumber Data .....   | 29        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                             | 29        |
| F. Metode Analisis .....                                     | 30        |
| 1. Uji Simultan (Uji F) .....                                | 31        |
| 2. Uji Parsial (Uji T) .....                                 | 32        |
| 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....                  | 33        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>           | <b>34</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                      | 34        |
| B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) .....                   | 35        |
| 1. Produk Domestik Regional Bruto (X1) .....                 | 36        |
| 2. Pengeluaran Pemerintah (X2) .....                         | 37        |
| 3. Jumlah Penduduk (X3) .....                                | 37        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Pendapatan Asli Daerah (Y).....                     | 38        |
| C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan) .....        | 39        |
| 1. Analisis Data Penelitian .....                      | 39        |
| 2. Hasil Pengujian Hipotesis .....                     | 42        |
| 3. Interpretasi .....                                  | 45        |
| a. Pengaruh PDRB terhadap PAD .....                    | 45        |
| b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD .....  | 46        |
| c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD .....         | 47        |
| d. Variabel yang Berpengaruh Dominan terhadap PAD..... | 47        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                             | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....                                     | 49        |
| B. Saran.....  | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                            | <b>51</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                                 |           |

## DAFTAR TABEL

| Nomor      | Judul  | Halaman |
|------------|--|---------|
| Tabel 4.1  | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone                 | 35      |
| Tabel 4.2  | PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bone Tahun<br>2008- 2017 | 36      |
| Tabel 4.3  | Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2008-2017            | 37      |
| Tabel 4.4  | Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2008-2017                   | 38      |
| Tabel 4.5  | Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2017            | 39      |
| Tabel 4.6  | Statistik Deskriptif   | 40      |
| Tabel 4.7  | Hasil Analisis Regresi Berganda                                  | 41      |
| Tabel 4.8  | Hasil Uji F  | 43      |
| Tabel 4.9  | Hasil Uji T  | 44      |
| Tabel 4.10 | Hasil Uji Koefisien Determinasi                                  | 45      |

## DAFTAR GAMBAR

| Nomor      | Judul           | Halaman |
|------------|-----------------|---------|
| Gambar 2.1 | Kerangka Konsep | 26      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2017 adalah 751.026 jiwa dengan jumlah penduduk laki- laki 358.889 jiwa dan penduduk perempuan 392.137 jiwa. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Kabupaten Bone merupakan Kabupaten yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 8,43% secara umum pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,23%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 49,37% terhadap total PDRB Kabupaten Bone. Secara umum perekonomian Kabupaten Bone didominasi oleh sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perikanan, dan perkebunan. Hal ini menjadikan Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih

dianggap sebagai hambatan dan harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efesien target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini. Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan faktor kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terlihat bahwa PAD khususnya di Kabupaten Bone tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya PAD Kabupaten Bone hanya berkisaran diangka itu-itu saja.

Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, seperti diatur dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsisten keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah (Nuraini Darise:2009).

Selaras dengan penjelasan mengenai PAD di atas Kabupaten Bone sangat menarik untuk diteliti, karena merupakan kabupaten yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,43% secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah 7,23%, sedangkan pada tahun 2016 Kabupaten Bone hanya berada diperingkat ke tiga setelah Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros di mana pertumbuhan ekonomi sebesar 9,06% secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,41%. Dan Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke tiga setelah kota Makassar dan Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun perolehan PAD Kabupaten Bone selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu pada tahun 2013 PAD Kabupaten Bone sebesar Rp 85.874.602.728,88. Kemudian Tahun 2014 PAD kabupaten Bone Rp 155.427.196.665,96 meningkat 80,99% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2015 PAD Kabupaten Bone sebesar Rp 159.777.772.085,62 peningkatan hanya 2,80%. Pada tahun 2016 PAD Kabupaten Bone Rp 180.148.967.473,17 meningkat 12,75% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017 PAD Kabupaten Bone mencapai Rp 280.478.099.485,46 peningkatan sebesar 55,69% dari tahun 2016. Terlihat bahwa setiap tahun pendapatan asli daerah Kabupaten Bone mengalami peningkatan namun tidak signifikan dari tahun ke tahun maka pemerintah daerah Kabupaten Bone terus mengupayakan dan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menyediakan

berbagai sumber ekonomi dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi barang atau jasa yang sifatnya jangka panjang (Sitianapessy:2013).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan daerah. PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Sukmaraga:2011).

Adapun perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone atas harga berlaku dan harga Konstan tahun 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013 PDRB atas harga berlaku mencapai 16.734,2 milyar sedangkan PDRB atas harga konstan sebesar 13.531,8 milyar maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone di tahun 2013 sebesar 6,09%. Pada tahun 2014 PDRB atas harga berlaku sebesar 19.866,9 milyar sedangkan PDRB

atas harga konstan sebesar 14.821,4 milyar pertumbuhan ekonomi sebesar 8,92%. Pada tahun 2015 PDRB atas harga berlaku sebesar 23.314,7 milyar dan nilai PDRB atas harga konstan sebesar 16.051,9 milyar pertumbuhan ekonomi sebesar 8,30%. Pada tahun 2016 nilai PDRB atas harga berlaku sebesar 26.301 milyar sedangkan nilai PDRB atas harga konstan meningkat 17.498,2 milyar dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 9,06% dibanding tahun 2015 . Dan pada tahun 2017 nilai PDRB atas harga berlaku sebesar 29.405,4 milyar sedangkan nilai PDRB atas harga konstan mencapai 18.974,1 milyar perekonomian kabupaten bone tumbuh sebesar 8,43% dibanding tahun 2016.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah sehingga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai dari pemerintah daerah maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman dimana akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat produktivitas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik para investor untuk membuka lapangan usaha di segala sektor PDRB sehingga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Deliamov:2007).

Adapun pengeluaran pemerintah Kabupaten Bone selama lima tahun terakhir 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013 pengeluaran Kabupaten Bone sebesar Rp 1.366.450.547.029,57. Kemudian tahun 2014 pengeluaran kabupaten Bone sebesar Rp 1.420.624.424.205,60 pertumbuhannya hanya

3,96% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2015 pengeluaran Kabupaten Bone Rp 1.841.777.308.407,41 pertumbuhan sebesar 29,65%. Pada tahun 2016 pengeluaran Kabupaten Bone Rp 2.044.751.534.876,91 pertumbuhan sebesar 11,02%. Dan pada tahun 2017 pengeluaran Kabupaten Bone menurun sebesar Rp 1.865.845.817.982,41 menurun 8,75% dari tahun 2016.

Hertanto Indrajati dan Sriyana Jaka (2011) menjelaskan bahwa jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi baik bagi Negara maju maupun Negara berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak yang mempunyai bakat dan ide kreatif dalam perkembangan teknologi tenaga ahli dengan meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah terhadap barang atau jasa. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah melainkan sebagian unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bone selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Bone sebesar 734.199 jiwa. Tahun 2014 jumlah penduduk kabupaten bone sebesar 738.515 jiwa. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Bone sebesar 742.912 jiwa. Tahun 2016 penduduk Kabupaten Bone sebesar 746.973 jiwa. Dan penambahan jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 751.026 jiwa. Hal ini menjadikan Kabupaten Bone menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke tiga setelah kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan di atas terlihat bahwa setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone mengalami peningkatan yang fluktuatif diikuti dengan peningkatan produk domestik regional bruto,

pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk. Maka sangat termotivasi bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut: **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka diharapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih baik ke berbagai kalangan, antara lain:

1. Peneliti
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis/peneliti khususnya dibidang ekonomi pembangunan.
  - b. Diharapkan meningkatkan pengembangan dan pengetahuan, khususnya mengenai pendapatan asli daerah.
2. Kelimuan
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
  - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran dan sebagai bahan informasi dan pertimbangan pemerintah Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang diterima dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah (Muh.Zulkifli:2013).

Setiap daerah otonom dalam hal ini baik provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber- sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri. (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus semaksimal mungkin, oleh karena itu pendapatan asli

daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Arif Eka Atmaja:2011).

Upaya untuk peningkatan pendapatan ali daerah dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu cara tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sasaran yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Meningkatkan efektivitas pemungutan yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Tsayani Taras dan Luh Gade Sri Artini:2017).

Berdasarkan undang- undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 27 jumlah dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang- kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fisik daerah yaitu kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang dimaksud kapasitas fiskal daerah adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari (PAD) dan dana bagi hasil. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari : pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus.(Arif Eka Atmaja:2011).

## 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### a. Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi .(Hendri Angriawan:2015).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dibagi 2 yaitu :

- 1) Pajak Provinsi yang terdiri dari : a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: a) pajak hotel. b) pajak restoran. c) pajak hiburan. D) pajak reklame. e) pajak penerangan jalan. f) pajak pengambilan bahan galian golongan C. g) pajak parkir.

Hendri Angriawan (2015) Menjelaskan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) fungsi penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. b) fungsi mengatur (*Reguler*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

#### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung (Prakoso:2010).

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan yaitu:

- 1)     Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2)     Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh PEMDA dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3)     Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu PEMDA dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan: pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMD).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Tjahya Supriatna bahwa hasil perusahaan daerah terdiri atas:

- 1) Bagi perusahaan daerah dengan modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (tanpa modal dari luar), hasil usaha daerah berupa dana pembangunan daerah bagian untuk anggaran belanja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Bagi perusahaan daerah dengan modal sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (dengan tambahan modal dari luar), hasil perusahaan daerah berupa dana pembangunan dan bagian untuk anggaran daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**d. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) jasa giro
- 3) pendapatan bunga
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi atau potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.

- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### 3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut (BPS,PDRB Kabupaten Bone:2018) pengertian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). BPS Kabupaten Bone menyebutkan bahwa PDRB dibagi menjadi dua yaitu : 1) PDRB atas harga konstan, yaitu menunjukkan nilai tambah barang serta jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun dasar. 2) PDRB atas harga berlaku, yaitu menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga

perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga (F.Makdalena :2015)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

- a. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- b. Segi Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- c. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Menurut atmaja (2011) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu:

- a. Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa
- b. Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan
- c. Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan

- d. Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

#### 4. **Pengeluaran Pemerintah**

##### a. **Definisi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung diakui oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu Negara, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat (Sitaniapessy:2013).

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.(Ahmad Jazuli Rahman:2016).

#### **b. Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya (Ridwan Ibrahim dan armaja:2015).

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) pemendagri No. 13 tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Berikut adalah belanja tidak langsung: a) Belanja pegawai. b) belanja bunga. c) belanja subsidi. d) belanja hibah. e) bantuan sosial. f) belanja bagi hasil. g) bantuan keuangan. h) belanja tidak terduga.

Kegiatan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud belanja langsung adalah sebagai berikut :

1) Belanja Modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

**5. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan daerah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah. (Simanjuntak:2011).

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 penduduk adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk merupakan faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan, dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan ekonomi (Jaya dan Widanta:2014).

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar Domestiknya (Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith:2014).

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap PAD.**

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya (F.Makdalena :2015).

### **2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD.**

Febrian Dwi (2014) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga meningkat.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap

tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sukirno:2013)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dinikmati orang banyak. Aktifitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran- pengeluaran untuk aktifitas sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah menggunakan pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkat.

### **3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap PAD**

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (F. Makdalena:2015).

### C. Tinjauan Empiris

Berikut beberapa penelitian empiris terdahulu yang memfokuskan studinya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah:

1. Suci Lestari (2016) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014. Menunjukkan bahwa variabel daya pajak, PDRB, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan secara parsial variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel daya pajak dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Hijrah Syahputra (2007) dengan judul Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Balai. Mengemukakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel bantuan pemerintah pusat tidak ikut membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Balai .
3. Eni Aryanti (2011) dengan judul Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. Menunjukkan bahwa pengaruh variabel PDRB berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap

peningkatan PAD di Kota Semarang karena laju inflasi diperlukan dalam pertimbangan tarif yaitu dengan cara penetapan pada tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat *flat*. Meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah, hal ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Karena laju inflasi hanya berguna sebagai pertimbangan perubahan tarif.

4. Lia Nabila (2017) dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, PDRB, dan pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara individual, variabel jumlah penduduk, PDRB, dan pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.
5. Dwi Fitria Rohman (2015) dengan judul Pengaruh Daya Pajak (Tax Effort) dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa secara umum pengaruh daya pajak (*tax effort*) dan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung memiliki hubungan yang rendah dan diterima. Pengaruh daya pajak (*tax effort*) dan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung tidak semua dipengaruhi dari daya pajak (*Tax Effort*) dan efektivitas pemungutan pajak reklame, namun dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

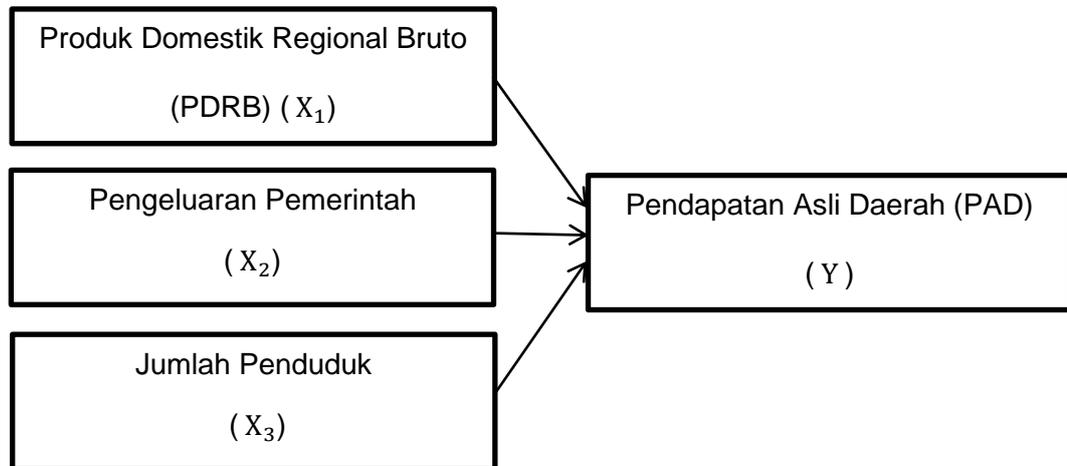
#### **D. Kerangka Konsep**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (sebagai variabel terikat) yang dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk (sebagai variabel bebas).

Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasukkan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dan PDRB merupakan total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau provinsi selama kurun waktu satu tahun.

Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah sehingga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai dari pemerintah daerah maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman dimana akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat produktivitas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik para investor untuk membuka lapangan usaha di segala sektor PDRB sehingga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah Penduduk dimasukkan dalam penelitian ini karena pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan pernyataan suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Maka sesuai dengan teori dan kerangka pikir, hipotesis dibawah ini merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Diduga bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Selatan.
3. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga jumlah penduduk berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone tahun 2008 sampai tahun 2017 yang akan diuji secara empiris.

Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dari hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone dijadikan objek penelitian karena dilihat dari letak geografis, luas wilayah dan populasi penduduk menjadikan wilayah ini memiliki peranan penting dalam perekonomian antar Provinsi yaitu Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan untuk memudahkan pengumpulan data yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian direncanakan kurang lebih selama 2 bulan.

### **C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

#### **1. Variabel Independen Dan Dependen**

Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu variabel pendapatan asli daerah, variabel PDRB, variabel pengeluaran pemerintah, dan variabel jumlah penduduk. Variabel dependen (Y) adalah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bone. Variabel independen ( $X_1$ ) adalah PDRB Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel independen ( $X_2$ ) adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel independen ( $X_3$ ) adalah jumlah penduduk Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **2. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah menurut badan pusat statistik (BPS) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Periode tahun 2008-2017 di Kabupaten Bone (dalam satuan rupiah).

b. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto menurut badan pusat statistik (BPS) adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Periode tahun 2008-2017 di Kabupaten Bone atas dasar harga konstan (dalam satuan rupiah).

c. **Pengeluaran Pemerintah**

pengeluaran pemerintah menurut badan pusat statistik (BPS) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Periode tahun 2008-2017 di Kabupaten Bone (dalam satuan rupiah).

d. **jumlah penduduk**

menurut badan pusat statistik adalah orang yang tinggal di kabupaten atau kota. Periode tahun 2008-2017 di Kabupaten Bone (dalam satuan jiwa).

#### **D. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data-data sekunder yang digunakan merupakan data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari BPS Kabupaten Bone.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah

dirumuskan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode

1. Studi lapangan

Merupakan kegiatan pengungkapan fakta- fakta melalui pengamatan dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung ke lapangan.

#### F. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dan menjawab hipotesis adalah regresi linear berganda dengan bantuan oleh data SPSS Versi 16.

Teknik analisis statistik inferensial dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi dari variabel  $X_1$

$X_1$  = PDRB

$\beta_2$  = Koefisien regresi dari variabel  $X_2$

$X_2$  = Pengeluaran pemerintah

$\beta_3$  = Koefisien regresi dari variabel  $X_3$

$X_3$  = jumlah penduduk

$\mu$  = Variabel residual (error)

Agar hasil yang diperoleh dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, maka hasil regresi persamaan diatas akan di uji dengan menggunakan uji statistik berikut ini:

### 1. Uji simultan (Uji F)

Menurut Made (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Caranya adalah dengan membandingkan antara lain kritis  $F_{tabel}$  dengan nilai  $F_{hitung}$  yang terdapat pada tabel *Analysis Variance* dari hasil perhitungan. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan semua variabel independen.

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

$H_0$  = koefisien  $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 0$  variabel bebas (X) yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk secara simultan tidak ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

$H_1$  = paling tidak salah satu variabel  $\neq 0$ , variabel bebas (X) yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk secara simultan ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

Pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 10% pengambilan keputusan menggunakan pengujian sebagai berikut :

- a. Jika tingkat signifikan  $> 0,1$  atau  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima berarti secara simultan atau bersama-sama variabel (X) tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).
- b. Jika tingkat signifikan  $< 0,1$  atau  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel (X) berpengaruh terhadap variabel (Y).

## 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk memastikan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan taraf nyata sebesar 10% perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 0$  variabel PDRB, Pengeluaran pemerintah dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

$H_1 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \neq 0$  variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD)  
Pengambilan keputusan :

- a. Jika tingkat signifikan  $> 0,1$  atau  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti bahwa secara individu variabel (X) tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).
- b. Jika tingkat signifikan  $< 0,1$  atau  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti bahwa secara individu variabel (X) berpengaruh terhadap variabel (Y).

### 3. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase variasi variabel independent dapat menjalankan variasi variabel dependent. Nilai  $R^2$  adalah nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Sebaliknya jika nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jika nilai  $R^2$  kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada keterkaitan.
- b. Jika nilai  $R^2$  mendekati (mendekati satu), berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel terikat ada keterkaitan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari kota Makassar Ibu Kotanya adalah Watampone. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke arah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-1120040' Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Luas wilayah Kabupaten Bone tercatat 4.559 km<sup>2</sup> dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha, meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 328 desa dan 44 kelurahan, di mana Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng merupakan 2 kecamatan terluas. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan ibukota Kabupaten Bone. Kabupaten Bone dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Tanete Riattang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi setelah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1

## Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone

| No             | Kecamatan             | Luas (km <sup>2</sup> ) |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1              | Bontacani             | 463,35                  |
| 2              | Kahu                  | 189,50                  |
| 3              | Kajuara               | 124,13                  |
| 4              | Salomekko             | 84,91                   |
| 5              | Tonra                 | 200,32                  |
| 6              | Patimpeng             | 130,47                  |
| 7              | Libureng              | 344,25                  |
| 8              | Mare                  | 263,50                  |
| 9              | Sibulue               | 155,80                  |
| 10             | Cina                  | 147,50                  |
| 11             | Barebbo               | 114,20                  |
| 12             | Ponre                 | 293,00                  |
| 13             | Lappariaja            | 138,00                  |
| 14             | Lamuru                | 208,00                  |
| 15             | Tellu Limpoe          | 318,10                  |
| 16             | Bengo                 | 164,00                  |
| 17             | Ulaweng               | 161,67                  |
| 18             | Palakka               | 115,32                  |
| 19             | Awangpone             | 110,70                  |
| 20             | Tellu Siattange       | 159,30                  |
| 21             | Amali                 | 119,13                  |
| 22             | Ajangale              | 139,00                  |
| 23             | Dua Boccoe            | 144,90                  |
| 24             | Cenrana               | 143,60                  |
| 25             | Tanete Riattang Barat | 53,68                   |
| 26             | Tanete Riattang       | 23,79                   |
| 27             | Tanete Riattang Timur | 48,88                   |
| Kabupaten Bone |                       | 559,00                  |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2018

## B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, maka dengan itu peneliti dapat menggambarkan variabel-variabel yang masuk dalam penelitian ini dimana variabel independen adalah PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone secara lengkap apakah variabel independen

signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun variabel independen dan variabel dependen yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. **Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ )**

PDRB mencerminkan seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu. Pengertian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berikut di bawah ini mengenai data PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bone (rupiah) pada periode tahun 2008-2017.

**Tabel 4.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017**

| <b>Tahun</b> | <b>PDRB (Rp)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|------------------|-----------------------|
| 2008         | 2.776.660,08     | -                     |
| 2009         | 2.985.922,41     | 7,54                  |
| 2010         | 3.213.085,05     | 7,63                  |
| 2011         | 3.412.323,54     | 6,20                  |
| 2012         | 12.730.119,51    | 8,21                  |
| 2013         | 13.531.848,64    | 6,30                  |
| 2014         | 14.821.376,97    | 9,53                  |
| 2015         | 16.051.871,49    | 8,30                  |
| 2016         | 17.498.179,41    | 9,06                  |
| 2017         | 18.974.053,12    | 8,43                  |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone*

## 2. Pengeluaran Pemerintah (X<sub>2</sub>)

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri serta sebagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. Anggaran dapat pula dijadikan untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berikut di bawah ini mengenai data pengeluaran pemerintah di Kabupaten Bone (rupiah) pada periode tahun 2008-2017.

**Tabel 4.3**  
**Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Bone Provinsi**  
**Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017**

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah<br>(Belanja Daerah) | Persentase (%) |
|-------|--|----------------|
| 2008  | 774.248.282.596,50                         | -              |
| 2009  | 756.602.969.492,20                         | -2,28          |
| 2010  | 774.466.683.951,82                         | 2,36           |
| 2011  | 1.025.723.291.964,95                       | 32,44          |
| 2012  | 1.149.246.094.806,86                       | 12,04          |
| 2013  | 1.366.450.547.029,57                       | 18,90          |
| 2014  | 1.487.000.153.623,44                       | 3,96           |
| 2015  | 1.841.777.308.407,41                       | 29,65          |
| 2016  | 2.044.751.534.876,91                       | 11,02          |
| 2017  | 1.865.845.817.982,41                       | -8,75          |

*Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone*

## 3. Jumlah Penduduk (X<sub>3</sub>)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi

menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah.

Berikut di bawah ini mengenai data jumlah penduduk di Kabupaten Bone (jiwa) pada periode tahun 2008-2017.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2017**

| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Total (jiwa) |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 2008  | 322.724   | 382.993   | 705.717      |
| 2009  | 338.407   | 373.341   | 711.748      |
| 2010  | 341.614   | 376.068   | 717.682      |
| 2011  | 345.394   | 379.511   | 724.905      |
| 2012  | 347.707   | 381.030   | 728.737      |
| 2013  | 349.717   | 384.402   | 734.119      |
| 2014  | 352.081   | 386.434   | 738.515      |
| 2015  | 345.502   | 388.410   | 742.912      |
| 2016  | 356.691   | 390.282   | 746.973      |
| 2017  | 358.889   | 392.137   | 751.026      |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone*

#### 4. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam mengelolah rumah tangganya sendiri, hal ini pemerintah Kabupaten Bone diharapkan untuk dapat memaksimalkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat dapat seminimum mungkin.

Berikut di bawah ini mengenai data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone (rupiah) pada periode tahun 2008-2017.

**Tabel 4.5**  
**Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan**  
**2008-2017**

| Tahun | PAD                | Pertumbuhan (%) |
|-------|--------------------|-----------------|
| 2008  | 50.669.450.902,27  | -               |
| 2009  | 38.469.112.668,42  | -24,08          |
| 2010  | 34.842.143.749,72  | -9,43           |
| 2011  | 33.780.847.477,28  | -3,05           |
| 2012  | 52.347.658.040,42  | 54,96           |
| 2013  | 85.874.602.728,88  | 64,05           |
| 2014  | 155.427.196.665,96 | 80,99           |
| 2015  | 159.777.772.085,62 | 2,80            |
| 2016  | 180.148.967.473,17 | 12,75           |
| 2017  | 280.478.099.485,46 | 55,70           |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone*

### **C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)**

#### **1. Analisis Data Penelitian**

Untuk dapat memberikan gambaran tentang data mengenai PDRB (X1), pengeluaran pemerintah (X2) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan penelitian periode tahun 2008-2017, berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif PAD sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

|                        | Mean     | Std. Deviation | N  |
|------------------------|----------|----------------|----|
| PAD                    | 107.1811 | 83.29758       | 10 |
| PDRB                   | 10.5991  | 6.69828        | 10 |
| Pengeluaran Pemerintah | 231.6093 | 370.47911      | 10 |
| Jumlah Penduduk        | 730.1422 | 15.14937       | 10 |

*Sumber: Output SPSS versi 16, data diolah*

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi berganda. Di mana penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dan hasil mean pada PAD (Y) sebesar 107,1811 dan menghasilkan standard deviation sebesar 83,29758, PDRB (X1) menghasilkan mean sebesar 10,5911 dan menghasilkan standard deviation sebesar 6,69828, pengeluaran pemerintah (X2) menghasilkan mean sebesar 231.6093 dan menghasilkan sandard deviation sebesar 370,47911, jumlah penduduk (X3) menghasilkan mean sebesar 730,1422 dan menghasilkan standard deviation sebesar 15,14937. Dalam penelitian ini jumlah data yang diambil selama 10 tahun terakhir yang hasilnya di dapat dari olah data SPSS versi 16.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)           | 4160.218                    | 2012.576   |                           | 2.067 | .084 |
| PDRB                   | 4.198                       | 5.573      | .338                      | .753  | .480 |
| Pengeluaran Pemerintah | .134                        | .062       | .596                      | 2.159 | .074 |
| Jumlah Penduduk        | 5.741                       | 2.814      | 1.044                     | 2.040 | .087 |

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output SPSS versi 16, data diolah

Berdasarkan pada tabel 4.7 (*coefficients*) dapat diketahui nilai koefisien PDRB (X1) sebesar 4,198, Pengeluaran Pemerintah (X2) sebesar 0,134 dan jumlah penduduk (X3) sebesar 5,741 dengan nilai konstanta sebesar 4160,218. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 4160,218 + 4,198X_1 + 0,134 X_2 + 5,741 X_3 + \mu$$

Hasil tersebut dapat diinterpretasi bahwa:

- Jika segala sesuatu variabel bebas dianggap konstan, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 4160,218.
- Koefisien regresi X1 = 4,198 artinya apabila variabel bebas PDRB (X1) meningkat sebesar Rp. 1 maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar Rp 4,198.

- c. Koefisien regresi  $X_2 = 0,134$  artinya apabila variabel bebas pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) meningkat sebesar Rp. 1 maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar Rp. 0,134.
- d. Koefisien regresi  $X_3 = 5,741$  artinya apabila variabel bebas jumlah penduduk ( $X_3$ ) meningkat sebesar 1% maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar Rp 5,741.

## 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat akan digunakan pengujian statistik dengan uji t dan f, yaitu untuk melihat tingkat signifikansi tiap koefisien regresi variabel independen secara parsial dan simultan. Sedangkan Koefisien Determinasi R ( $R^2$ ) untuk mengukur faktor manakah yang dominan terhadap variabel dependen atau PAD.

### a. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi destimasi layak atau tidak. Layak disini yaitu model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut Uji F karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova.

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Signifikansi model regresi pada penelitian ini diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig). Selengkapnya mengenai hasil uji F penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 54010.391      | 3  | 18003.464   | 12.805 | .005 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 8435.996       | 6  | 1405.999    |        |                   |
|       | Total      | 62446.388      | 9  |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

*sumber :Output SPSS versi 16, data diolah*

Pada tabel 4.8 diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,805 dan Nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,288 ini dapat dicari dengan menggunakan Ms Excel dengan rumus =FINV(10%,3,6) dan dengan derajat bebas = 10-3-1=6.

Untuk pengujian dua pihak adalah nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,805 lebih besar dari nilai Nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,288 dengan tingkat signifikansi  $0,005 < 0,1$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas PDRB ( $X_1$ ) Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**b. Uji Parsial (Uji T)**

Uji t dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Uji t merupakan uji secara parsial atau masing-masing variabel yang dilakukan untuk mengetahui

pengaruh secara parsial variabel bebas (PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel coefficients seperti pada tabel 4.9

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)             | 4160.218                    | 2012.576   |                           | 2.067 | .084 |
|       | PDRB                   | 4.198                       | 5.573      | .338                      | .753  | .480 |
|       | Pengeluaran Pemerintah | .134                        | .062       | .596                      | 2.159 | .074 |
|       | Jumlah Penduduk        | 5.741                       | 2.814      | 1.044                     | 2.040 | .087 |

*a. Dependent Variable: PAD*

*Sumber : Output SPSS versi 16, data diolah*

Untuk mengetahui koefisien regresi variabel bebas mana yang pengaruhnya signifikan maka dilakukan uji koefisien regresi secara individual (parsial). Perhitungan koefisien regresi secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.9 (*coefficients*). Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel 4.9 tersebut diatas diperoleh  $t_{hitung}$  untuk masing-masing variabel bebas PDRB ( $X_1$ ) sebesar 0,753 , Pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) sebesar 2,159 dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) sebesar 2,040. Dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,943 ini dapat dicari dengan menggunakan Ms. Excel dengan rumus =TINV(10%,6).

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menjelaskan variabel pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R Square. Berikut di bawah ini adalah hasil koefisien determinasi:

**Tabel 4.10**  
**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .930 <sup>a</sup> | .865     | .797              | 37.49666                   | 1.939         |

Jika dilihat dari nilai R Square sebesar 0,865 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel PDRB, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk memiliki proporsi pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 86,5% sedangkan sisanya 13,5% (100%-86,5%) dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### 3. Interpretasi (Pembahasan)

#### a. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan koefisien regresi secara parsial pada tabel 4.9 (*coefficients*) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel bebas ( $X_1$ ) sebesar 0,753 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,943 nilai dapat dicari dengan menggunakan Ms Excel dengan rumus = TINV(10%,6) derajat bebas =10-3-1.

Oleh karena itu untuk koefisien variabel PDRB ( $X_1$ ) sebesar  $t_{hitung}$  0,753 <  $t_{tabel}$  1,943, dan terlihat tingkat signifikan sebesar 0,480 lebih besar dari tingkat signifikan 0,1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB ( $X_1$ ) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Lestari (2016) dan Eni Aryanti (2011), mengemukakan bahwa PDRB berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

#### **b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dari hasil perhitungan koefisien regresi secara parsial pada tabel 4.9 (*coefficients*) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel bebas ( $X_2$ ) sebesar 2,159 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,943 nilai ini dapat dicari dengan menggunakan Ms Excel dengan rumus =TINV (10%,6) derajat bebas = 10-3-1 = 6.

Oleh karena itu untuk koefisien variabel pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) sebesar  $t_{hitung}$  2,159 >  $t_{tabel}$  1,943, dan terlihat signifikansi sebesar 0,074 lebih kecil dari 0,1. Maka pada tingkat kekeliruan 10%  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Febrian Dwi (2014), mengemukakan Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik yang dinikmati orang banyak, aktifitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran- pengeluaran untuk aktifitas sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

**c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dari hasil perhitungan koefisien regresi secara parsial pada tabel 4.9 (*coefficients*) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel bebas jumlah penduduk ( $X_3$ ) sebesar 2,040 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,943. Nilai ini dapat dicari di Ms Excel dengan rumus =TINV(10%,6) derajat bebas =  $10-3-1 = 6$ .

Oleh karena itu untuk koefisien variabel jumlah penduduk ( $X_3$ ) sebesar  $t_{hitung}$  2,040 >  $t_{tabel}$  1,943, dan terlihat signifikansi sebesar 0,087 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,1. Maka pada tingkat kekeliruan 10%  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Hasil Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Nabila (2017), Hijrah Syahputra (2007), mengemukakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**d. Variabel yang berpengaruh Dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dari pembahasan ketiga variabel bebas yang dianalisis dapat dilihat tingkat dominasi masing-masing variabel bebas tersebut menjadi pertimbangan pendapatan asli daerah (PAD) pada tabel 4.7.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa variabel bebas yang paling berkontribusi dominan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah variabel jumlah penduduk ( $X_3$ ) Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat koefisien regresi atau nilai B sebesar 5,741.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PDRB berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone. Dengan nilai  $t_{hitung} 0,753 < t_{tabel} 1,943$  dan nilai signifikansi  $0,480 > 0,1$ .
2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone. Dengan nilai  $t_{hitung} 2,159 > t_{tabel} 1,943$  dan nilai signifikansi  $0,074 < 0,1$ .
3. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone. Dengan nilai  $t_{hitung} 2,040 > t_{tabel} 1,943$  dan nilai signifikansi  $0,087 < 0,1$ .
4. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan variabel bebas PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk. Maka ditemukan faktor dominan yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yaitu variabel jumlah penduduk, dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda variabel jumlah penduduk mempunyai nilai koefisien paling tinggi sebesar 5,741.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis meyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau retribusi daerah, eksplorasi sumber daya alam yang lebih banyak lagi, serta pemerintah Kabupaten Bone memberikan sumbangsih berupa bantuan sarana prasarana kepada sektor-sektor yang termasuk dalam cakupan PDRB sehingga dapat menarik investor untuk membuka lapangan usaha di Kabupaten Bone sehingga menciptakan objek pajak yang baru.
2. Bagi para peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan cara penelitian yang sejenis tetapi dengan variabel yang berbeda atau variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat dilihat bahwa selain PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terdapat juga variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angriawan, H., & boediono. (2015). Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata dan Peranan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*, 1(10).
- Asmuruf, F. M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado*, 15(5).
- Atmaja, A. E. (2011, september 19). Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. *Dinamika Pengeluaran Pemerintah*, 24-28.
- Bone dalam angka 2008-2017.
- Deliamov. (2007). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Halim Abdul, Taras Tsayani, & Artini Sri Gede Luh. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana Denpasar*, 6(5).
- Ibrahim Ridwan, & Armaja. (2015, September). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten/Kota Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).
- Mamuka Veronika, & Elim Ingriani. (2014, maret 1). Analisis Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talau. *Jurnal EMBA Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, 2(1).
- Nuraini, D. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Prakoso. (2010). *Pajak dan Retribusi*. Yogyakarta: UI.
- Rahman, A. J. (2016, Desember). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2).
- Sitianapessy, H. A. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1).
- Sukmaraga. (2011). *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Rajawali.

- Thodaro, M.P, & Smith,S.C. (2014). *Pembangunan Ekonomi Jilid I*. Jakarta:Erlangga
- Undang-undang No. 34 tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UU RI.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.UU RI.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan*.UU RI.
- Wandosa, H. D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Mimika. *Jurnal Keuda*, 2(3).
- Zulkifli, M. (2013, Mei). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1).

### Descriptive Statistics

|                        | Mean     | Std. Deviation | N  |
|------------------------|----------|----------------|----|
| PAD                    | 107.1811 | 83.29758       | 10 |
| PDRB                   | 10.5991  | 6.69828        | 10 |
| Pengeluaran Pemerintah | 231.6093 | 370.47911      | 10 |
| Jumlah Penduduk        | 730.1422 | 15.14937       | 10 |

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

| Model | Variables Entered  | Variables Removed | Method  |
|-------|--|-------------------|---------|
| 1     | Jumlah Penduduk,<br>Pengeluaran Pemerintah,<br>PDRB <sup>a</sup> |                   | . Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

### Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .930 <sup>a</sup> | .865     | .797              | 37.49666                   | 1.939         |

a. Predictors: (constant), jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 54010.391      | 3  | 18003.464   | 12.805 | .005 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 8435.996       | 6  | 1405.999    |        |                   |
|       | Total      | 62446.388      | 9  |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)             | 4160.218                    | 2012.576   |                           | 2.067 | .084 |
|       | PDRB                   | 4.198                       | 5.573      | .338                      | .753  | .480 |
|       | Pengeluaran Pemerintah | .134                        | .062       | .596                      | 2.159 | .074 |
|       | Jumlah Penduduk        | 5.741                       | 2.814      | 1.044                     | 2.040 | .087 |

a. Dependent Variable: PAD

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

|                      | Minimum   | Maximum  | Mean     | Std. Deviation | N  |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------------|----|
| Predicted Value      | 6.7710    | 231.4729 | 107.1811 | 77.46712       | 10 |
| Residual             | -42.48616 | 49.00508 | .00000   | 30.61589       | 10 |
| Std. Predicted Value | -1.296    | 1.604    | .000     | 1.000          | 10 |
| Std. Residual        | -1.133    | 1.307    | .000     | .816           | 10 |

a. Dependent Variable: PAD

### Correlations

|                     |                           | PAD   | PDRB  | Pengeluaran<br>Pemerintah | Jumlah<br>Penduduk |
|---------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------|
| Pearson Correlation | PAD                       | 1.000 | .855  | -.545                     | .863               |
|                     | PDRB                      | .855  | 1.000 | -.783                     | .942               |
|                     | Pengeluaran<br>Pemerintah | -.545 | -.783 | 1.000                     | -.839              |
|                     | Jumlah Penduduk           | .863  | .942  | -.839                     | 1.000              |
| Sig. (1-tailed)     | PAD                       | .     | .001  | .052                      | .001               |
|                     | PDRB                      | .001  | .     | .004                      | .000               |
|                     | Pengeluaran<br>Pemerintah | .052  | .004  | .                         | .001               |
|                     | Jumlah Penduduk           | .001  | .000  | .001                      | .                  |
| N                   | PAD                       | 10    | 10    | 10                        | 10                 |
|                     | PDRB                      | 10    | 10    | 10                        | 10                 |
|                     | Pengeluaran<br>Pemerintah | 10    | 10    | 10                        | 10                 |
|                     | Jumlah Penduduk           | 10    | 10    | 10                        | 10                 |

**Lampiran 1**

| <b>TAHUN</b> | <b>PDRB (X1)</b> | <b>PENGELUARAN<br/>PEMERINTAH (X2)</b> | <b>JUMLAH<br/>PENDUDUK<br/>(X3)</b> | <b>PAD (Y)</b>     |
|--------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| 2008         | 2.776.660,08     | 774.248.282.596,50                     | 705.717                             | 50.669.450.902,27  |
| 2009         | 2.985.922,41     | 756.602.969.492,20                     | 711.748                             | 38.469.112.668,42  |
| 2010         | 3.213.085,05     | 774.466.683.951,82                     | 717.682                             | 34.842.143.749,72  |
| 2011         | 3.412.323,54     | 1.025.723.291.964,95                   | 724.905                             | 33.780.847.477,28  |
| 2012         | 12.730.119,51    | 1.149.246.094.806,86                   | 728.737                             | 52.347.658.040,42  |
| 2013         | 13.531.848,64    | 1.366.450.547.029,57                   | 734.119                             | 85.874.602.728,88  |
| 2014         | 14.821.376,97    | 1.487.000.153.623,44                   | 738.515                             | 155.427.196.665,96 |
| 2015         | 16.051.871,49    | 1.841.777.308.407,41                   | 742.912                             | 159.777.772.085,62 |
| 2016         | 17.498.179,41    | 2.044.751.534.876,91                   | 746.973                             | 180.148.967.473,17 |
| 2017         | 18.974.053,12    | 1.865.845.817.982,41                   | 751.026                             | 280.478.099.485,46 |

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## BIOGRAFI PENULIS



Hernawati panggilan Herna lahir di Malaysia pada tanggal 20 November 1995 dari pasangan suami istri Bapak Mursidin dan Ibu Nurtang. Peneliti adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Cambaya lulus tahun 2008, SMP Negeri 1 Sungguminasa Lulus tahun 2011, SMK Negeri 6 Makassar lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.